



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan
DINAS PERHUBNGAN
Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Praya, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	10
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	15
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN	
KINERJA APBD.....	18
2.1 Kebijakan Keuangan.....	18
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	20
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	25
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum	25
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	28
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD	28
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	29
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	29

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	33
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	46
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	46
5.2 Pos-pos Neraca	56
5.3 Pos-pos Laporan Operasional	68
5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	80
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	83
6.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	83
6.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	85
BAB VII PENUTUP.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	18
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	21
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	23
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024	25
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	46
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	47
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	47
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	49
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	49
Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	50
Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	51
Tabel 5.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	53
Tabel 5.9 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53
Tabel 5.10 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Bangunan	55
Tabel 5.11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56
Tabel 5.12 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/Defisit LRA	56
Tabel 5.13 Rincian Aset	57
Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar	57
Tabel 5.15 Rincian Kas dan Setara Kas	58
Tabel 5.16 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	58
Tabel 5.17 Persediaan	59
Tabel 5.18 Daftar Nilai Aset Tetap	60
Tabel 5.19 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah	61
Tabel 5.20 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	61
Tabel 5.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	62
Tabel 5.22 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	62
Tabel 5.23 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	63
Tabel 5.24 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	63

Tabel 5.25 Daftar Aset Lainnya	65
Tabel 5.26 Rincian Kewajiban	65
Tabel 5.27 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	66
Tabel 5.28 Rincian Utang Belanja	66
Tabel 5.29 Rincian Utang Belanja Pegawai	67
Tabel 5.30 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	67
Tabel 5.31 Rincian Pendapatan – LO.....	68
Tabel 5.32 Pendapatan Asli Daerah – LO	69
Tabel 5.33 Rincian Pendapatan Asli Daerah	69
Tabel 5.34 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	70
Tabel 5.35 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah -LO	71
Tabel 5.36 Rincian Beban	72
Tabel 5.37 Rincian Beban Operasional	72
Tabel 5.38 Rincian Beban Pegawai.....	73
Tabel 5.39 Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO	74
Tabel 5.40 Rincian Beban Barang dan Jasa	75
Tabel 5.41 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa – LO	76
Tabel 5.42 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	77
Tabel 5.43 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	79
Tabel 5.45 Rincian Surplus/Defisit – LO	79
Tabel 5.46 Ekuitas Awal – LO.....	80
Tabel 5.47 Surplus/Defisit – LO	80
Tabel 5.48 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	81
Tabel 5.49 Koreksi Ekuitas Aset Tetap.....	82
Tabel 5.50 Rincian Ekuitas Akhir	82
Gambar 6.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	84
Gambar 6.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Status	85
Gambar 6.3 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	86
Gambar 6.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Gambar 6.5 Data Pegawai berdasarkan Jabatan	87
Tabel 6.1 Data PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Laporan Operasional
Lampiran 6	:	STS Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2023 disetor 2024
Lampiran 7	:	Bukti bayar tagihan Listrik, internet, air bulan desember 2024 dibayar Januari 2025
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Penambahan dan Penguran Aset Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 17 Januari 2025



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. I. LALU HERDAN, M.Si
NIP 19690815 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

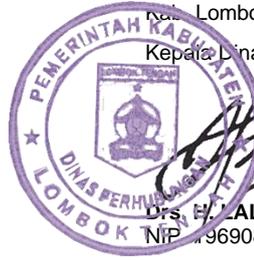


Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
4.1.02	Retribusi Daerah	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	694.704.444,85
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	368.520,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
	JUMLAH PENDAPATAN	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
5	BELANJA DAERAH	19.789.132.386,00	19.516.614.026,66	98,62	20.130.989.857,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.148.957.586,00	18.015.981.797,50	99,27	18.116.425.857,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.063.329.329,00	4.014.729.373,00	98,80	3.448.235.710,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.085.628.257,00	14.001.252.424,50	99,40	14.668.190.147,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.148.957.586,00	18.015.981.797,50	99,27	18.116.425.857,00
5.2	BELANJA MODAL	1.640.174.800	1.500.632.229,16	91,49	2.014.564.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.565.480	1.268.142.718,12	90,09	1.395.689.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.609.320	232.489.511,04	99,95	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	618.875.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.640.174.800	1.500.632.229,16	91,49	2.014.564.000,00
	JUMLAH BELANJA	19.789.132.386,00	19.516.614.026,66	98,62	20.130.989.857,00

	SURPLUS/DEFISIT	(19.118.032.386,00)	(19.264.634.026,66)	100,77	(19.435.916.892,15)
--	------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------

Makassar, Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si

NIP. 196908151989031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah			
Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	26.126.669.445,31	26.848.138.551,17
1.1	ASET LANCAR	242.623.638,00	181.039.400,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	9.300,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	9.300,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	242.623.638,00	181.030.100,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	242.623.638,00	181.030.100,00
	JUMLAH ASET LANCAR	242.623.638,00	181.039.400,00
1.3	ASET TETAP	25.048.103.762,31	25.831.157.106,17
1.3.01	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	14.387.741.291,07	13.119.598.572,95
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.702.490.951,01	5.562.490.951,01
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.658.865.404,00	1.658.865.404,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	20.980.000,00	20.980.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	424.866.800,02	415.072.300,02
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68.400.000,00	68.400.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.814.818,00	7.814.818,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	871.549.999,99	871.549.999,99
1.3.02.09	Alat Persenjataan	28.981.000,00	28.981.000,00
1.3.02.10	Komputer	443.270.500,00	421.349.500,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	4.160.521.818,05	4.064.094.599,93
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.617.996.507,27	4.385.506.996,23
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.403.349.578,32	3.355.598.999,23
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.214.646.928,95	1.029.907.997,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.103.226.880,00	22.103.226.880,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	16.063.739.730,00	16.063.739.730,00
1.3.04.02	Bangunan Air	5.249.440.950,00	5.249.440.950,00
1.3.04.03	Instalasi	13.471.200,00	13.471.200,00
1.3.04.04	Jaringan	776.575.000,00	776.575.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(17.813.410.916,03)	(15.529.725.343,01)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.747.736.684,03)	(6.645.711.648,01)

1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(855.505.948,00)	(768.397.350,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.210.168.284,00)	(8.115.616.345,00)
	JUMLAH ASET TETAP	25.048.103.762,31	25.831.157.106,17
1.5	ASET LAINNYA	835.942.045,00	835.942.045,00
1.5.04	Aset Lain-lain	835.942.045,00	835.942.045,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	835.942.045,00	835.942.045,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	835.942.045,00	835.942.045,00
	JUMLAH ASET	26.126.669.445,31	26.848.138.551,17
2	KEWAJIBAN	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
2.1.06	Utang Belanja	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	88.993.490,00	104.138.295,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.007.598.440,00	1.224.753.872,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
3	EKUITAS	25.030.077.515,31	25.519.246.384,17
3.1	EKUITAS	25.030.077.515,31	25.519.246.384,17
	JUMLAH EKUITAS	25.030.077.515,31	25.519.246.384,17
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26.126.669.445,31	26.848.138.551,17

Kap. Lombok Tengah, 25 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 196908151989031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	251.980.000,00	695.087.989,60	(443.107.989,60)	(63,75)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	251.980.000,00	695.087.989,60	(443.107.989,60)	(63,75)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	251.980.000,00	694.704.444,85	(442.724.444,85)	(63,73)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	251.980.000,00	619.704.444,85	(367.724.444,85)	(59,34)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	383.544,75	(383.544,75)	(100,00)
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	0,00	15.024,75	(15.024,75)	(100,00)
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	368.520,00	(368.520,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	251.980.000,00	695.087.989,60	(443.107.989,60)	(63,75)
	JUMLAH PENDAPATAN	251.980.000,00	695.087.989,60	(443.107.989,60)	(63,75)
8	BEBAN	20.005.773.595,52	19.636.383.941,00	369.389.654,52	(21,86)
8.1	BEBAN OPERASI	17.722.088.022,50	17.308.848.561,00	413.239.461,50	(11,36)
8.1.01	Beban Pegawai	3.999.584.568,00	3.460.256.656,00	539.327.912,00	6,97
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.678.912.774,00	2.358.377.152,00	320.535.622,00	5,28
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.301.955.544,00	1.060.877.029,00	241.078.515,00	14,31
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.716.250,00	41.002.475,00	(22.286.225,00)	(85,83)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	13.722.503.454,50	13.848.591.905,00	(126.088.450,50)	(15,94)
8.1.02.01	Beban Barang	1.457.879.609,50	1.016.807.788,00	441.071.821,50	29,35
8.1.02.02	Beban Jasa	11.922.893.154,00	12.529.414.039,00	(606.520.885,00)	(20,20)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	247.695.500,00	252.110.000,00	(4.414.500,00)	(2,27)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	94.035.191,00	50.260.078,00	43.775.113,00	62,68
	JUMLAH BEBAN OPERASI	17.722.088.022,50	17.308.848.561,00	413.239.461,50	(11,36)
				-	
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.685.573,02	2.327.535.380,00	(43.849.806,98)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.102.025.036,02	944.715.186,00	157.309.850,02	(100,00)

8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.108.598,00	85.399.161,00	1.709.437,00	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.094.551.939,00	1.297.421.033,00	(202.869.094,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.685.573,02	2.327.535.380,00	(43.849.806,98)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	20.005.773.595,52	19.636.383.941,00	369.389.654,52	(21,86)
				-	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.753.793.595,52)	(18.941.295.951,40)	(812.497.644,12)	4,29

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 196908151989031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023**



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	25.519.246.384,17	25.002.267.557,17
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.753.793.595,52)	(18.941.295.951,40)
RK PPKD	19.264.624.726,66	19.458.274.777,06
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		1,34
LAIN-LAIN		0
EKUITAS AKHIR	25.030.077.515,31	25.519.246.384,17

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 196908151989031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**DINAS PERHUBUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No.

17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.

- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
TARGET KINERJA KEUANGAN**

2.1. Kebijakan Keuangan

2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD

1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan

1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1	Retribusi Daerah	826.100.000,00	671.100.000,00	(155.000.000,00)	(23.10)
	Jumlah Pendapatan	826.100.000,00	671.100.000,00	(155.000.000,00)	(23.10)
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	3.675.522.017,00	4.063.329.329,00	387.807.312,00	9.54
2	Belanja Barang dan Jasa	13.453.134.145,00	14.085.628.257,00	632.494.112,00	4.49
3	Belanja Modal	1.407.565.480,00	1.407.565.480,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	18.768.830.962,00	19.789.132.386,00	1.020.301.424,00	5,44
	Defisit/Surplus	(17.942.730.962,00)	(19.118.032.386,00)	(1.175.301.424,00)	6,55

Menyikapi kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut di atas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading* sektor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- a. **Pendataan Ulang Lokasi Parkir:** Identifikasi lokasi parkir yang memiliki potensi pendapatan tinggi, termasuk area pasar, terminal, objek wisata, dan jalan-jalan strategis.
 - b. **Melaksanakan uji petik pada 78 titik parkir:** Mengidentifikasi dan menganalisis potensi pendapatan dari setiap titik tersebut. Hasil uji petik ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan target pendapatan retribusi secara spesifik pada masing-masing titik parkir, sehingga pengelolaan retribusi dapat lebih terukur dan optimal.
 - c. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola parkir resmi di wilayahnya untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi parkir liar.
 - d. **Sanksi Tegas untuk Pelanggaran:** Memberikan sanksi bagi petugas atau masyarakat yang melanggar aturan retribusi parkir, termasuk parkir liar yang tidak memberikan kontribusi ke daerah.
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
- a. **Penggunaan Sumber Daya Internal:** Memanfaatkan tenaga internal untuk pekerjaan perawatan ringan agar tidak perlu menyewa jasa pihak ketiga.
 - b. **Optimalisasi Pemanfaatan Aset:** Memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada sebelum mengadakan aset baru, seperti kendaraan atau peralatan kantor.
 - c. **Evaluasi Kinerja Anggaran:** Mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Keterbatasan Anggaran
 - Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan secara optimal.
 - Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan prioritas, sehingga beberapa program tidak dapat direalisasikan tepat waktu atau sepenuhnya.

- b. Prioritas yang Terbagi
Banyaknya kegiatan yang harus dibiayai, sementara sumber dana terbatas, sehingga sulit menentukan prioritas tanpa mengorbankan aspek lain.
- c. Keterbatasan untuk Perawatan dan Pemeliharaan
Anggaran untuk perawatan infrastruktur dan aset, seperti lampu lalu lintas, rambu, dan fasilitas pendukung lainnya, sering kali tidak mencukupi sehingga mempercepat kerusakan.
- d. Kurangnya Fleksibilitas Penganggaran
Rigiditas dalam pengelolaan anggaran membuat dinas sulit melakukan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan mendesak atau darurat.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan urusan perhubungan. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

- 1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini adalah untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas melalui layanan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan layanan umum kesekretariatan lainnya. Program ini juga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, program ini berperan dalam meningkatkan kinerja serta koordinasi internal guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mencapai target kinerja secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 5.917.507.543,00 dengan terealisasi senilai Rp 5.704.030.228,00 atau 96,39%

- 2) Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan menyediakan serta merehabilitasi perlengkapan jalan seperti rambu, marka jalan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, program ini juga fokus pada pengamanan dan penertiban lalu lintas selama pelaksanaan event internasional, nasional, maupun event insidental lainnya, serta pengawasan dan penertiban parkir dan angkutan umum, baik barang maupun orang, guna menciptakan sistem transportasi yang tertib dan aman bagi masyarakat. Selain itu program ini juga bertujuan untuk merehabilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut program ini didukung dengan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 13.825.848.517,00 terealisasi senilai Rp 13.767.935.398,66 atau 99,58%
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran
 Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengawasan dan penertiban izin angkutan laut, memastikan bahwa operator angkutan laut mematuhi standar keselamatan serta memiliki izin yang sah. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menciptakan transportasi laut yang aman, tertib, dan berkualitas bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 45.776.326,00 dengan realisasi senilai Rp 45.123.600,00 atau 98,57%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	PENDAPATAN				
1	Retribusi Daerah	826.100.000,00	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55
	JUMLAH PENDAPATAN	826.100.000,00	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
II	BELANJA				
1	Belanja Operasi	17.128.656.162,00	18.148.957.586,00	18.015.981.797,37	99,27
1.1	Belanja Pegawai	3.675.522.017,00	4.063.329.329,00	4.014.729.373,00	98,80
1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.453.134.145,00	14.085.628.257,00	14.001.252.424,37	99,40
2	Belanja Modal	1.640.174.800,00	1.640.174.800,00	1.500.632.229,16	91,49
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.565.480,00	1.407.565.480,00	1.268.142.718,12	90,09
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.609.320,00	232.609.320,00	232.489.511,04	99,95
	JUMLAH BELANJA	18.768.830.962,00	19.789.132.386,00	19.516.614.026,53	98,62

Realisasi pendapatan lebih rendah dari anggarannya senilai Rp. 251.980.000,00 atau 37,55% hal ini terjadi karena:

- a. Sejak tahun 2024 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lagi dipungut biaya atau digratiskan.
- b. Ada kenaikan target Retribusi Parkir pada APBD Perubahan dari target awal sebesar Rp. 292.200.000,00 menjadi Rp. 671.700.000,00 tanpa melalui analisis potensi.
- c. Target ini adalah potensi sementara, yang disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan hanya sebesar 30% sedangkan sisanya adalah pendapatan untuk juru parkir.
- d. Terdapat pengurangan potensi retribusi parkir karena ada beberapa titik parkir yang berubah menjadi pajak parkir.
- e. Terdapat potensi retribusi parkir dari retribusi parkir tempat khusus yang seharusnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tapi sampai saat ini masih dikelola oleh OPD atau pihak lain.

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya senilai Rp 19.516.614.026,53 atau 98,62%, disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah efisiensi yang diperoleh melalui proses negosiasi yang cermat selama pelaksanaan pekerjaan dan perbedaan harga antara Standar Satuan Harga (SSH) yang tercantum dalam SIPD dengan harga riil barang dan jasa di pasar. Harga riil yang lebih rendah pada beberapa komponen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, baik yang terkait dengan bahan/material maupun

biaya operasional lainnya, memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran secara keseluruhan.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)* 100
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan jalan	69%	67,70%	98,12%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Input:</i> Dana yang Dibutuhkan	Rp12.671.542.383,00	Rp 12.629.949.937,62	99,67%
		<i>Output:</i> Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Unit	12 Unit	100%
		<i>Outcome:</i> Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	9,76 %	54,11 %	554,41%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Input:</i> Dana yang Dibutuhkan	Rp 139.398.800,00	Rp 136.292.500,00	97,77%
		<i>Output:</i> Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	36 kali	36 kali	100%
		<i>Outcome:</i> Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	9,76 %	9,76 %	100%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Input:</i> Dana yang Dibutuhkan	Rp 525.508.734,00	Rp 524.589.761,04	99,83%
		<i>Output:</i> Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 paket	3 paket	100%
		<i>Outcome:</i> Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	98%	63,29%	64,58%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Input:</i> Dana yang Dibutuhkan	Rp 313.113.800,00	Rp 304.943.600,00	97,39%
		<i>Output:</i> Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 bulan	12 bulan	100%
		<i>Outcome:</i> Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	60%	60%	100%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Input:</i> Dana yang Dibutuhkan	Rp 104.280.000,00	Rp 103.085.000,00	98,85%
		<i>Output:</i> Jumlah Perlengkapan Jalan di	12 bulan	12 bulan	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
		Outcome: Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	76%	74,80%	98,42%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input: Dana yang Dibutuhkan	Rp 72.004.800,00	Rp 68.599.400,00	95,27%
		Output: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	36 kali	36 kali	100%
		Outcome: Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	57%	0%	0%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		60%	100,33%	167,22%
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi OrangPerorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yangBeroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input: Dana yang Dibutuhkan	Rp 45.776.326,00	Rp 45.123.600,00	98,57%
		Output: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	36 kali	36 kali	100%
		Outcome: Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang	60%	100,33%	167,22%

(Sumber Data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7= (4-5)/4*100
1	PENDAPATAN					
	Retribusi Daerah	671.100.000,00	251.980.000,00	695.072.964,00	37,55	(175,84)
	JUMLAH PENDAPATAN	671.100.000,00	251.980.000,00	695.072.964,00	37,55	(175,84)
2	BELANJA					
	Belanja Operasi	18.148.957.586,00	18.015.981.797,50	18.116.425.857,00	99,27	(0,56)
	Belanja Pegawai	4.063.329.329,00	4.014.729.373,00	3.448.235.710,00	98,80	14,11
	Belanja Barang dan Jasa	14.085.628.257,00	14.001.252.424,50	14.668.190.147,00	99,40	(4,76)
	Belanja Modal	1.640.174.800,00	1.500.632.229,16	2.014.564.000,00	91,49	(34,25)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.565.480,00	1.268.142.718,12	1.395.689.000,00	90,09	(10,06)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.609.320,00	232.489.511,04	0,00	99,95	100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	618.875.000,00	0,00	#DIV/0!
	JUMLAH BELANJA	19.789.132.386,00	19.516.614.026,66	20.130.989.857,00	98,62	(3,15)

Pada bagian pendapatan terjadi penurunan senilai Rp. 443.092.964,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 671.100.000,00 terealisasi senilai Rp 251.980.000,00 atau 37,55%.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penurunan pengeluaran senilai Rp 614.375.830,34 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 19.789.132.386,00 terealisasi Rp 19.516.614.026,66 atau 98,62%.

Capaian bagian pendapatan senilai 37,55% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum target anggaran setelah perubahan senilai Rp 671.100.000,00, terealisasi senilai Rp 251.980.000,00 atau 37,55%

Capaian bagian belanja senilai 98,62% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 4.063.329,00 terealisasi senilai Rp 4.014.729.373,00 atau 98,80%
- b. Belanja Barang dan Jasa target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 14.085.628.257,00 terealisasi 14.001.252.424,50 atau 99,40
- c. Belanja Modal target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.640.174.800,00 terealisasi Rp. 1.500.632.229,16 atau 91,49

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami penurunan (175,84%), yaitu dari Rp. 695.072.964,00 pada tahun 2023 menjadi Rp. 251.980.000,00 pada tahun 2024.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 3,15%, yaitu Rp 20.130.989.857,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 19.516.614.026,66 pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan dari retribusi daerah yang hanya Rp. 251.980.000,00 atau hanya sebesar 37,55% disebabkan beberapa kendala, diantaranya:
 - Belum ada kajian yang mendalam terkait potensi sesungguhnya dari sumber retribusi daerah yang ada di Dinas Perhubungan dalam hal ini Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan potensi.
 - Sistem pemungutan yang tidak optimal yang masih manual sehingga masih rentan terhadap kebocoran.
 - Kurang patuhnya petugas parkir disebabkan karena minimnya pengawasan serta belum adanya penindakan terhadap pelanggaran.

b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak mengalami kendala yang signifikan terkait belanja pada tahun anggaran 2024. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian setiap rincian belanja yang di atas 80%.

Solusi yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, terutama dari segi pendapatan antara lain:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan sosialisasi terhadap semua juru pungut dan juru parkir yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang narasumbernya dari Tim Saber Pungli Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Akan melakukan uji petik pada tahun 2025 di lokasi parkir yang tersebar diseluruh Kabupaten Lombok Tengah untuk mendapatkan nilai riil potensi dari masing-masing titik parkir.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam

Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

1. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
2. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
3. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca

dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

4.4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

4.4.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

d. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka

pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

g. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b. Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan

bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

4.4.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

b. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

4.4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di

Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

4.4.4 Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.4.1 Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

4.4.4.2 Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4.4.4.3 Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4.4.4.4 Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.4.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	619.704.444,85
	a Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	208.676.700,00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	208.676.700,00
	b Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	411.027.744,85
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	411.027.744,85

No.	Uraian	2024			2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00		
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah						
1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	368.520,00
	a	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	368.520,00
		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	368.520,00
Total		671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85	

Capaian realisasi 2024 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 disebabkan antara lain karena:

- a. Penetapan target PAD tidak berdasarkan atas hasil analisis potensi riil.
- b. Kurangnya pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang efektif bisa menyebabkan pelanggaran parkir yang tidak terdeteksi dan tidak dikenakan denda.
- c. Dan sebab-sebab lainnya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PAD 2024 lebih rendah disebabkan karena pada tahun 2023 selain retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah juga menarik PAD dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

5.1.1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak ada penerimaan dari sumber ini.

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 juga tidak ada penerimaan dari sumber ini.

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp 19.516.614.026,66 mencapai 98,62% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 19.789.132.386,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	18.148.957.586,00	18.015.981.797,50	99,27	18.116.425.857,00
2.	Belanja Modal	1.640.174.800,00	1.500.632.229,16	91,49	2.014.564.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.789.132.386,00	19.516.614.026,66	98,62	20.130.989.857,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 18.015.981.797,50 atau mencapai 99,27% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp18.148.957.586,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.063.329.329,00	4.014.729.373,00	98,80	3.448.235.710,00
2	Belanja Barang Jasa	14.085.628.257,00	14.001.252.424,00	99,40	14.668.190.147,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		18.148.957.586,00	18.015.981.797,50	99,27	18.116425.857,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar 4.014.729.373,00 atau mencapai 98,80% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar 4.063.329.329,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	BELANJA PEGAWAI				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.692.966.671,00	2.686.137.659,00	99,75	2.353.197.535,00
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.100.467.147,00	2.098.004.736,00	99,88	1.819.743.324,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.060.193.947,00	2.057.981.536,00	99,89	1.806.507.324,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.273.200,00	40.023.200,00	99,38	13.236.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	224.306.341,00	223.752.201,00	99,75	207.822.908,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	224.233.519,00	223.752.201,00	99,79	207.822.908,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	72.822,00	-	-	-
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.113.792,00	122.905.000,00	99,83	119.440.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.113.792,00	122.905.000,00	99,83	119.440.000,00
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.771.180,00	41.530.000,00	99,42	6.080.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.771.180,00	41.530.000,00	99,42	6.080.000,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.431.561,00	73.580.000,00	97,55	70.827.200,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.700.713,00	71.060.000,00	97,74	69.927.200,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.730.848,00	2.520.000,00	92,28	900.000,00
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.061.218,00	123.331.260,00	99,41	126.517.740,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	122.805.218,00	122.317.380,00	99,60	126.155.640,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.256.000,00	1.013.880,00	80,72	362.100,00
g.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.624.248,00	3.004.763,00	82,91	2.738.090,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.624.248,00	3.004.763,00	82,91	2.738.090,00
h.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	191.184,00	29.699,00	15,53	28.273,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	126.707,00	28.591,00	22,56	28.103,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	64.477,00	1.108,00	1,72	170,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.317.193.658,00	1.292.168.964,00	98,10	1.071.742.200,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.317.193.658,00	1.292.168.964,00	98,10	1.071.742.200,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.315.943.658,00	1.291.031.464,00	98,11	1.071.742.200,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.250.000,00	1.137.500,00	91,00	-
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.169.000,00	36.422.750,00	68,50	23.295.975,00
a.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	33.555.000,00	29.450.750,00	87,77	17.289.975,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.848.500,00	11.744.250,00	74,10	9.701.475,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	17.706.500,00	17.706.500,00	100,00	7.588.500,00
b.	Belanja Honorarium	19.614.000,00	6.972.000,00	35,55	6.006.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.614.000,00	6.972.000,00	35,55	6.006.000,00
JUMLAH		4.063.329.329,00	4.014.729.373,00	98,80	3.448.235.710,00

Penyebab lebih tingginya capaian realisasi anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun Anggaran dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan gaji pokok ASN pada Tahun Anggaran 2024 menjadi faktor utama kenapa realisasi belanja pegawai tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
2. Adanya tambahan ASN dari lulusan STTD tahun 2024 serta tambahan pegawai untuk mengisi beberapa jabatan struktural yang kosong pada tahun anggaran 2023.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp 14.001.252.424,00 atau mencapai 99,40% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp 14.085.628.257,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	1.581.030.650,00	1.519.473.147,50	96,11	1.097.018.896,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	1.576.830.650,00	1.515.273.147,50	96,10	1.097.018.896,00
	b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa	12.153.355.607,00	12.140.048.586,00	99,89	13.268.801.173,00
	a. Belanja Jasa Kantor	12.064.931.333,00	12.051.807.588,00	99,89	13.251.583.173,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.968.000,00	13.895.998,00	99,48	13.968.000,00
	c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.011.600,00	1.000.000,00	98,85	0,00
	d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.002.674,00	22.903.000,00	99,57	3.250.000,00
	e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.442.000,00	50.442.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan	248.650.000,00	247.695.500,00	99,62	252.110.000,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.650.000,00	235.697.500,00	99,60	252.110.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	11.998.000,00	99,98	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	102.592.000,00	94.035.191,00	91,66	50.260.078,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.592.000,00	94.035.191,00	91,66	50.260.078,00
	Jumlah	14.085.628.257,00	14.001.252.424,50	99,40	14.668.190.147,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya penghematan dan efisiensi dari selisih harga di SSH dengan harga riil barang dan jasa di lapangan menjadi penyebab utama nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 lebih rendah dari anggaran tahun 2024.
2. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 karena penurunan tagihan PJU

tahun 2024 sebagai hasil dari kegiatan penertiban PJU ilegal dan PJU non meterisasi bersama PLN di 5 kecamatan.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 1.500.632.229,16 atau mencapai 91,49% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 1.640.174.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.407.565.480,00	1.268.142.718,12	90,09	1.395.689.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	232.609.320,00	232.489.511,04	99,95	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	618.875.000,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.640.174.800,00	1.500.632.229,16	91,49	2.014.564.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp 1.268.142.718,12 atau mencapai 90,09% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.407.565.480,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.278.735.835,00	1.140.000.000,00	89,15	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.278.735.835,00	1.140.000.000,00	89,15	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.278.735.835,00	1.140.000.000,00	89,15	0,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.278.040.000,00
	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.278.040.000,00
	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.278.040.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.794.615,00	9.794.615,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.794.615,00	9.794.615,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Mebel	9.794.615,00	9.794.615,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	6.486.500,00	6.486.500,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00
7	Belanja Modal Komputer	21.921.430,00	21.921.430,00	100,00	5.180.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	21.921.430,00	21.921.430,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.921.430,00	21.921.430,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00
8	Belanja Modal Rambu-Rambu	97.113.600,00	96.427.218,12	99,29	81.800.000,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	97.113.600,00	96.427.218,12	99,29	81.800.000,00
	Belanja Modal Rambu Bersuar	97.113.600,00	96.427.218,12	99,29	81.800.000,00
J u m l a h		1.407.565.480,00	1.268.142.718,12	90,09	1.395.689.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 lebih rendah dari anggaran tahun 2024 disebabkan karena adanya efisiensi atau selisih harga mobil hidrolik PJU di SSH dengan harga riil di pasar.
2. Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 lebih rendah dari realiasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 disebabkan karena lebih banyak jenis peralatan dan mesin yang dibeli pada tahun 2023 dengan harga yang cukup tinggi terutama untuk peralatan dan mesin untuk alat uji berkala kendaraan bermotor di UPT PKB.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp 232.489.511,04 atau mencapai 99,95% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 232.609.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.790.000,00	47.750.579,09	99,92	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.790.000,00	47.750.579,09	99,92	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	47.790.000,00	47.750.579,09	99,92	0,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	184.819.320,00	184.738.931,95	99,96	0,00
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	184.819.320,00	184.738.931,95	99,96	0,00
	Belanja Modal Pagar	184.819.320,00	184.738.931,95	99,96	0,00
	J u m l a h	232.609.320,00	232.489.511,04	99,95	0,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Realiasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 lebih rendah dari anggaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 karena ada pengurangan harga saat proses negosiasi dengan pihak ketiga.

2. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 lebih tinggi dari realiasi tahun 2023 karena tidak ada belanja modal Gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2023.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	618.875.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	618.875.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	618.875.000,00
	J u m l a h	0,00	0,00	0,00	618.875.000,00

Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024 yang menjadi penyebab realisasi tahun 2024 lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

5.1.3. Surplus/(Defisit)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 251.980.000,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 19.516.614.026,66 sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar Rp19.264.634.026,66 atau (100,77)% dari anggaran sebesar (Rp19.786.132.386,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	695.072.964,85
2	Belanja	19.789.132.386,00	19.516.614.026,66	98,62	20.130.989.857,00
	Surplus/ (Defisit)	(19.118.032.386,00)	(19.264.634.026,66)	100,77	(19.435.916.892,15)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perhubungan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 26.126.669.445,31 dan Rp 26.848.138.551,17. Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.13. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-2 (Rp)
1	Aset Lancar	242.632.938,00	181.039.400,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	25.048.103.762,31	25.831.157.106,17
4	Properti Investasi	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	835.942.045,00	835.942.045,00
	Jumlah	26.126.669.445,31	26.848.138.551,17

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 242.623.638,00 dan Rp. 181.039.400,00. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.14. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	0,00	9.300,00
2	Piutang	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
4	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	242.623.638,00	181.030.100,00
	Jumlah	242.623.638,00	181.039.400,00

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek

yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 9.300,00. Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.15. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.300,00	9.300,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	0,00	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
	Jumlah	9.300,00	9.300,00

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang di terima bendahara penerimaan dari para wajib pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah per tanggal Neraca belum di setorkan ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp. 9.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian Pendapatan	No STS dan tanggal STS	Jumlah
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
2	Dst		
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.1.1.2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.1.1.3. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum seluruhnya diserahkan.

Saldo Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.1.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 242.623.638,00 dan Rp. 181.030.100,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.17 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Lainnya	142.334.232,00	180.600.000,00
2	Alat Tulis Kantor	289.406,00	430.100,00
3	Bahan Cetak	100.000.000,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Jumlah	242.623.638,00	181.030.100,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan T.A 2024

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 25.048.103.762,31 dan Rp. 25.831.157.106,17. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.18. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
2	Peralatan dan Mesin	14.387.741.291,07	13.119.598.572,95
3	Gedung dan Bangunan	4.617.996.507,27	4.385.506.996,23
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	22.103.226.880,00	22.103.226.880,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	42.861.514.678,34	41.360.882.449,18
7	Akumulasi Penyusutan	(17.813.410.916,03)	(15.529.725.343,01)
	Jumlah Bersih	25.048.103.762,31	25.831.157.106,17

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.752.550.000,00 dan Rp. 1.752.550.000,00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.19. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
1.3.1.01	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00

Tidak ada pengurangan maupun penambahan nilai asset tetap tanah per 31 Desember 2024.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 14.387.741.291,07 dan Rp. 13.119.598.572,95. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.20 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	14.387.741.291,07	13.119.598.572,95
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.702.490.951,01	5.562.490.951,01
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.658.865.404,00	1.658.865.404,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	20.980.000,00	20.980.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	424.866.800,02	415.072.300,02
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68.400.000,00	68.400.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.814.818,00	7.814.818,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	871.549.999,99	871.549.999,99
1.3.02.09	Alat Persenjataan	28.981.000,00	28.981.000,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 1.268.142.718,12 dan pengurangan senilai Rp. 0,00 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.21. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	13.119.598.572,95
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	1.268.142.718,12
2	Mutasi antar OPD	0,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	0,00
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	0,00
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	1.268.142.718,12
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	0,00
2	Ekstracomtabel	0,00
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	0,00
4	Reklas ke KIB Lainnya	0,00
5	Mutasi antar OPD	0,00
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir	14.387.741.291,07

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.617.996.507,27 dan Rp. 4.385.506.996,23. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.22. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	4.617.996.507,27	4.385.506.996,23
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.403.349.578,32	3.355.598.999,23
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.214.646.928,95	1.029.907.997,00

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.23. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	4.385.506.996,23
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	232.489.511,04
2	Nilai Taksiran	0,00
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	0,00
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	0,00
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	0,00
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	0,00
7	Belanja Modal Melalui BTT	0,00
8	Mutasi antar OPD	0,00
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	232.489.511,04
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	0,00
2	Mutasi antar OPD	0,00
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	0,00
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	0,00
5	Extracomptable	0,00
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	0,00
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	0,00
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	0,00
9	Reklas ke Persediaan	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir	4.617.996.507,27

5.2.1.2.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 22.103.226.880,00 dan Rp. 22.103.226.880,00. Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.24. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	22.103.226.880,00	22.103.226.880,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	16.063.739.730,00	16.063.739.730,00
1.3.04.02	Bangunan Air	5.249.440.950,00	5.249.440.950,00

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.04.03	Instalasi	13.471.200,00	13.471.200,00
1.3.04.04	Jaringan	776.575.000,00	776.575.000,00

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya.

Tidak ada aset tetap lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024.

5.2.1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024.

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 17.813.410.916,03 dan Rp. 15.529.725.343,01.

5.2.1.3. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

5.2.1.4. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 835.942.045,00 dan Rp. 835.942.045,00. Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud		
4	Aset Lain-lain :	835.942.045,00	835.942.045,00
	Aset Dalam Proses TGR		
	Aset Rusak Berat	835.942.045,00	835.942.045,00
	DED		
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		
	Jumlah	835.942.045,00	835.942.045,00

5.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.096.591.930,00 dan Rp. 1.328.892.167,00 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.26. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
2	Kewajiban Jangka Panjang		

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
	Jumlah	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.096.591.930,00 dan Rp. 1.096.591.930,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.27. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Transfer		
	Jumlah	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00

5.2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 1.096.591.930,00 dan Rp. 1.328.892.167,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.28. Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	88.993.490,00	104.138.295,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.007.598.440,00	1.224.753.872,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas		

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
3	Utang Belanja Modal		
4	Utang Belanja Bansos		
5	Utang Belanja Transfer		
	Total	1.096.591.930,00	1.328.892.167,00

5.2.2.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 88.993.490,00 dan Rp. 104.138.295,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.29. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	0,00	7.224.885,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	88.993.490,00	79.206.910,00
3	Utang Belanja TPG PNSD	0,00	0,00
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	0,00	0,00
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00	17.706.500,00
	Total	88.993.490,00	104.138.295,00

5.2.2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.007.598.440,00 dan Rp. 1.224.753.872,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	212.939,00	204.101,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.005.631.927,00	1.222.816.224,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.753.574,00	1.733.547,00
	Total	1.007.598.440,00	1.224.753.872,00

5.2.2.3.3 Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

5.2.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 25.030.077.515,31 dan Rp. 25.519.246.384,17. Nilai ekuitas menurun senilai Rp. 489.168.868,86 atau sebesar 1,92% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. 25.519.246.384,17.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 251.980.000,00 dan senilai Rp. 695.087.989,60. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	251.980.000,00	695.087.989,60
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	251.980.000,00	695.087.989,60

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 251.980.000,00 dan Rp. 695.087.989,60. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	251.980.000,00	694.704.444,85
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	0,00	383.544,75
Jumlah	251.980.000,00	695.087.989,60

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.33. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
	a. Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	251.980.000,00	694.704.444,85
	a. Retribusi Jasa Umum	251.980.000,00	619.704.444,85
	b. Retribusi Jasa Usaha	0,00	75.000.000,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
	a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	383.544,75
	a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
	b. Jasa Giro	0,00	15.024,75
	c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	368.520,00
	Jumlah	251.980.000,00	695.087.989,60

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 2024 senilai Rp. 0,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024

dan 2023 masing-masing senilai Rp. 251.980.000,00 dan Rp. 694.704.444,85. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp. 251.980.000,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp.0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Retribusi Jasa Umum - LO	251.980.000,00	619.704.444,85
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	251.980.000,00	208.676.700,00
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	411.027.744,85
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	75.000.000,00
1	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	75.000.000,00
TOTAL		251.980.000,00	694.704.444,85

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Tidak adanya pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2024.
 - b. Tidak adanya pendapatan dari Retribusi Penyewaan Bangunan pada Tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 251.980.000,00

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00, sehingga terdapat perbedaan antara realisasi LRA dan LO senilai Rp 0,00

5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 383.544,75.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	0,00
Jasa Giro – LO	0,00	15.024,75
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	368.520,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	0,00	0,00
Dst...		
Jumlah	0,00	383.544,75

Penjelasan:

Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Tidak ada penerimaan pendapatan dari Jasa Giro pada Tahun 2024.
- b. Tidak adanya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2024.

5.3.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00 sedangkan pendapatan Transfer LO untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 0,00 sedangkan pendapatan LO untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.3.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 20.005.773.595,52 dan Rp 19.636.383.941,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	20.005.773.595,52	19.636.383.941,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		20.005.773.595,52	19.636.383.941,00

5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 20.005.773.595,52 dan Rp 19.636.383.941,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	3.999.584.568,00	3.460.256.656,00
2	Beban Barang dan Jasa	13.722.503.454,50	13.848.591.905,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.685.573,02	2.327.535.380,00
Jumlah		20.005.773.595,52	19.636.383.941,00

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 3.999.584.568,00 dan Rp 3.460.256.656,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.678.912.774,00	2.358.377.152,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	2.091.126.436,00	1.824.809.464,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	223.406.240,00	207.935.801,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	122.905.000,00	119.440.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	41.530.000,00	6.080.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.580.000,00	70.827.200,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	123.331.260,00	126.517.740,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.004.763,00	2.738.090,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	29.075,00	28.857,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.301.955.544,00	1.060.877.029,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.301.955.544,00	1.060.877.029,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.716.250,00	41.002.475,00
a.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	11.744.250,00	34.996.475,00
b.	Beban Honorarium	6.972.000,00	6.006.000,00
Jumlah		3.999.584.568,00	3.460.256.656,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Ada kenaikan pada komponen gaji pokok ASN pada tahun anggaran 2024.
 - b. Ada penambahan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 yang selain berpengaruh terhadap gaji dan tunjangan ASN juga mempengaruhi besaran nilai beban tambahan penghasilan ASN pada tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 15.144.805,00 (Rp 4.014.729.373,00 – Rp 3.999.584.568,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. **Tunggakan Gaji atau Tunjangan yang Dibayarkan di Tahun Berikutnya**
 Beban pegawai dalam LO menggunakan basis akrual, yang mengakui seluruh kewajiban yang terjadi selama tahun 2024, termasuk gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan hingga akhir tahun. Namun, dalam LRA, belanja pegawai hanya mencakup pengeluaran yang benar-benar dibayarkan selama tahun anggaran berjalan. Perbedaan ini menyebabkan nilai beban pegawai dalam LO lebih kecil jika ada kewajiban yang belum direalisasikan hingga 31 Desember 2024.
 - b. **Pengeluaran Terkait Beban Pegawai Tahun Sebelumnya**
 Jika terdapat pengeluaran untuk gaji atau tunjangan yang seharusnya diakui pada tahun anggaran sebelumnya tetapi baru dibayarkan pada tahun 2024, maka nilai tersebut akan masuk ke belanja pegawai dalam LRA tahun 2024, tetapi tidak diakui sebagai beban pegawai dalam LO tahun 2024.

Tabel 5.39. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	15.144.805,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	88.993.490,00
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	
Utang Gaji dan Tunjangan	
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	
Utang Honorarium	
Utang Tambahan Penghasilan PNS	88.940.740,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	52.750,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	104.138.295,00

Uraian	Nilai
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	7.224.885,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	79.206.910,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	17.706.500,00
Utang Honorarium	
Jumlah Penjelasan Selisih	15.144.805,00

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp 13.722.503.454,50 dan Rp 13.848.591.905,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang		
1	Beban Barang Pakai Habis	1.453.679.609,50	1.016.807.788,00
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.200.000,00	0,00
B	Beban Jasa		
1	Beban Jasa Kantor	11.834.652.156,00	12.512.196.039,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.895.998,00	13.968.000,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	22.903.000,00	3.250.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.442.000,00	0,00
C	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235.697.500,00	252.110.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.998.000,00	0,00
D	Beban Perjalanan Dinas		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.035.191,00	50.260.078,00
	Jumlah	13.722.503.454,50	13.848.591.905,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp 14.001.252.424,50. Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 13.722.503.454,50

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan Beban Barang Pakai Habis
Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 436.871.821,50 dibandingkan tahun 2023.
 - b. Penambahan Beban Aset Tetap Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Pada tahun 2023 tidak ada, namun pada tahun 2024 sebesar Rp 4.200.000,00 untuk pengadaan barang yang tidak dikapitalisasi.
 - c. Penurunan Beban Jasa Kantor
Beban ini menurun sebesar Rp 677.543.883,00 karena pengurangan volume atau efisiensi pada beberapa program layanan.
 - d. Penambahan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
Tahun 2024 meningkat sebesar Rp 19.653.000,00 dibandingkan 2023.
 - e. Peningkatan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Beban perjalanan dinas meningkat sebesar Rp 43.775.113,00 karena intensitas perjalanan dinas lebih tinggi di 2024.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp 278.748.970,00 (Rp 14.001.252.424,50 - Rp 13.722.503.454,50). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.41. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	278.748.970,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	1.188.628.540,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	1.007.598.440,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	181.030.100,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	1.467.377.510,00

No	Uraian	Nilai
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.224.753.872,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	242.623.638,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarasa	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		(278.748.970,00)

5.3.2.1.3 Beban Bunga - LO

Beban Bunga untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.4 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.5 Beban Hibah – LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban

5.3.2.1.6 Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp 2.283.685.573,02 dan Rp 2.327.535.380,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.102.025.036,02	944.715.186,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.108.598,00	64.143.205,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.094.551.939,00	1.297.421.033,00
Jumlah	2.283.685.573,02	2.327.535.380,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan Aset Tetap Baru
Adanya pengadaan peralatan dan mesin baru pada Tahun 2024 yang menyebabkan kenaikan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 157.309.850,02 (Rp 1.102.025.036,02 - Rp 944.715.186,00).
 - b. Penurunan Beban Penyusutan pada Gedung dan Bangunan
Penurunan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp 22.965.393,00 (Rp 87.108.598,00 - Rp 64.143.205,00) terjadi akibat aset tertentu yang telah mendekati akhir umur manfaat atau telah direklasifikasi menjadi aset yang tidak disusutkan.
 - c. Beban penyusutan kategori ini menurun sebesar Rp 202.869.094,00 (Rp 1.297.421.033,00 - Rp 1.094.551.939,00) akibat revisi atau penyesuaian nilai aset yang sudah sepenuhnya disusutkan.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.3 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.43. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	251.980.000,00	695.087.989,60
2	Beban-LO	20.020.918.400,52	19.636.383.941,00
Surplus/(Defisit) Operasional		(19.768.938.400,52)	-18.941.295.951,40

5.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

5.3.5 SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.45. Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	251.980.000,00	695.087.989,60
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	251.980.000,00	695.087.989,60
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	20.020.918.400,52	19.636.383.941,00
✓ Beban Operasional	20.020.918.400,52	19.636.383.941,00
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(19.768.938.400,52)	-18.941.295.951,40
Kegiatan Non-Operasional		
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(19.768.938.400,52)	-18.941.295.951,40

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.46. Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	25.519.246.384,17	25.002.267.557,17

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.4.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.47. Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(19.753.793.595,52)	(18.941.295.951,40)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) – LO	(19.753.793.595,52)	(18.941.295.951,40)

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah hanya memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.3.5*.

5.4.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp 19.264.624.726,66 dan Rp 19.458.274.777,06.

5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.48. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	1,34
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban	0,00	0,00
Total	0,00	1,34

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.4.4.1 Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.4.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 sebagai kurang saji dan senilai Rp 1,34 sebagai kurang saji. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.49. Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
A	Koreksi Nilai Aset Tetap		
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	1,34
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
	Total	0,00	1,34

Koreksi ini muncul sebagai dampak dari kesalahan sistem yang terjadi dalam proses pencatatan sebelumnya.

5.4.4.3 Koreksi Ekuitas – Lain-lain

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai total Rp. 0,00

5.4.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.50. Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	25.030.077.515,31	25.519.246.384,17

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.3.3*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan umum di sektor perhubungan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyediakan layanan transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka dirancang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas, yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan seluruh aspek perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang bertugas mengoordinasikan urusan administratif, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Sekretaris ini berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional dinas, termasuk dalam hal keuangan dan tata kelola. Sekretaris Dinas dibantu oleh 2 (dua) orang kasubbag, yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

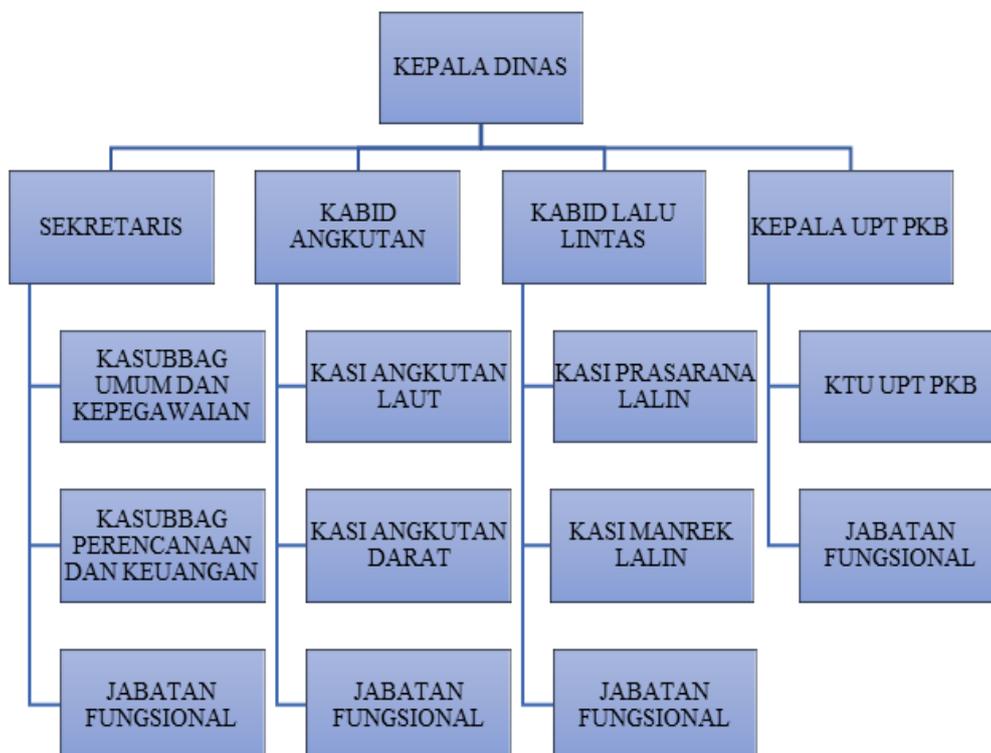
Selain itu, kepala Dinas juga dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan angkutan umum baik laut dan darat,

perparkiran dan bidangn lalu lintas. Kepala-kepala bidang ini bekerja bersama timnya untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja sesuai bidang tanggung jawabnya. Masing-masing kepala bidang dibantu oleh 2 orang kasi yang bertugas dalam pelaksanaan program di berbagai sektor angkutan dan lalu lintas.

Dinas Perhubungan juga memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, yang berfokus pada pengelolaan layanan uji berkala kendaraan bermotor sebagai upaya memastikan keamanan dan kelayakan kendaraan. Untuk mendukung operasional UPT tersebut, terdapat 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha (KTU) UPT yang mengelola administrasi dan layanan internal UPT.

Dengan struktur ini, setiap bagian memiliki peran yang saling melengkapi, memastikan pelaksanaan program kerja dinas berjalan optimal. Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut.

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

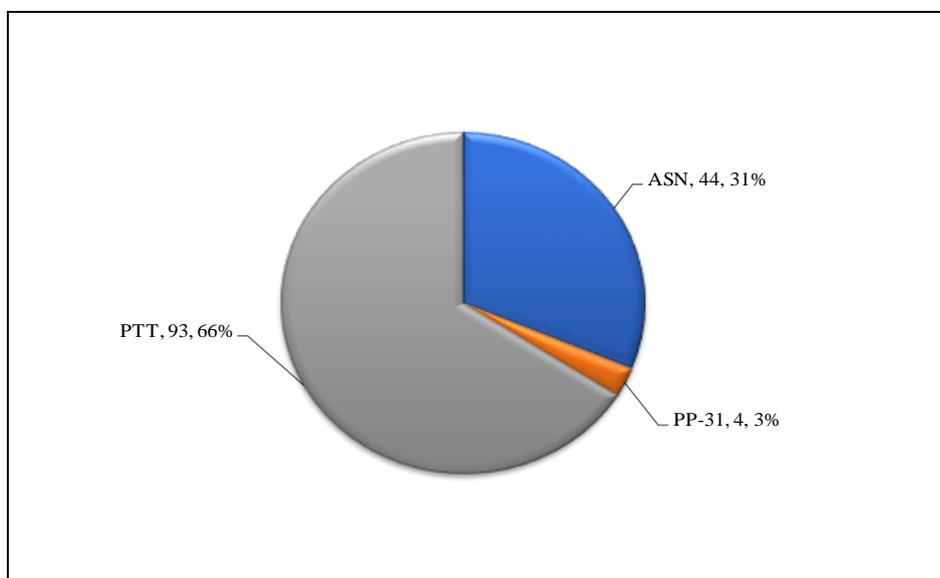


6.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dianalisa dari dua sisi, yaitu dari sisi kuantitas dan sisi kualitas.

Berdasarkan kuantitas pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 141 orang dengan rincian ASN sejumlah 44 orang dan Non ASN sejumlah 97 orang yang terdiri Honor Daerah (PP-31) sejumlah 4 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 93 orang. Rincian pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut ini:

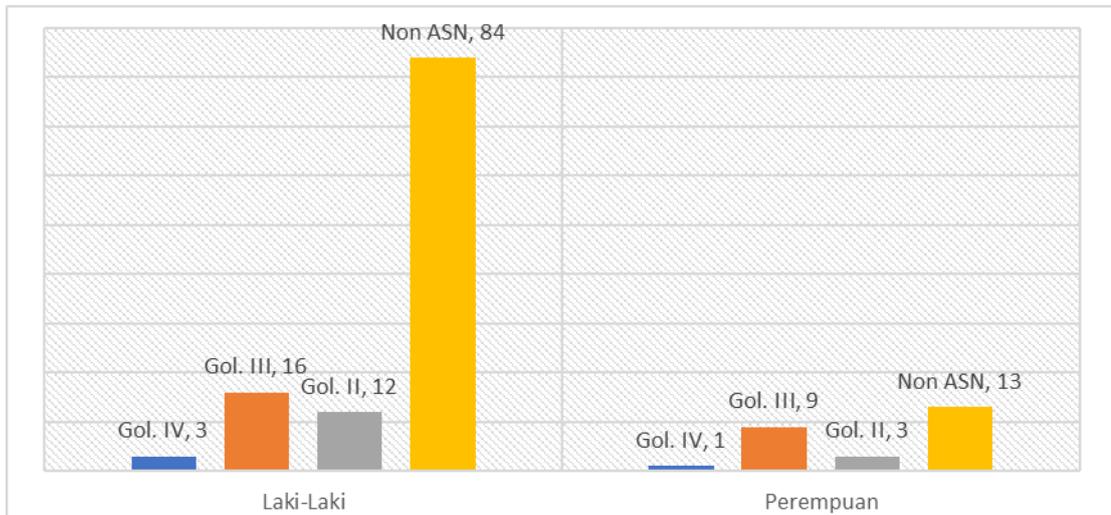
Gambar 6.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Status



Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Terdiri 115 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Jika lebih dirinci lagi maka ASN terdiri dari laki-laki sebanyak 31 orang dan sisanya sebanyak 13 orang adalah Perempuan. Jumlah ASN ini jika dikelompokkan sesuai dengan golongannya maka ASN laki-laki terdiri dari 12 orang Golongan II, 16 orang Golongan III dan 3 orang sisanya berada dalam Golongan IV. Sedangkan ASN perempuannya terdiri dari 1 orang Golongan IV, 9 orang Golongan III dan 3 orang Golongan II. Sementara Non ASN terdiri dari laki-laki sejumlah 84 orang dan Perempuan sejumlah 13 orang tanpa ada pembagian golongan. Jika ditampilkan dalam bentuk grafik maka akan terlihat seperti pada Gambar 6.3 berikut ini:

Gambar 6.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan



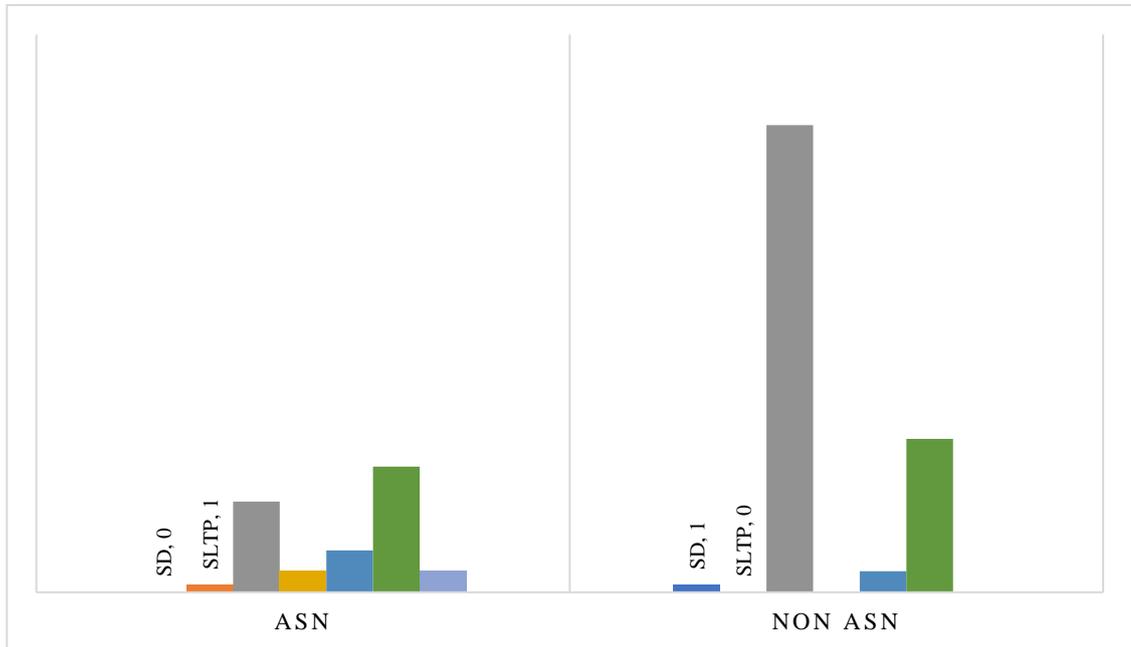
Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya dinilai dari jumlah pegawai, tetapi juga dari aspek kualitas yang meliputi tingkat pendidikan, jabatan, dan jenis Diklat Penjenjangan yang pernah diikuti. Beragamnya tingkat pendidikan pegawai, mulai dari pendidikan dasar hingga pascasarjana (S2), mencerminkan keberagaman kompetensi yang tersedia di dalam organisasi. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan program kerja.

Selain itu, jabatan yang dimiliki pegawai menggambarkan tanggung jawab yang diemban dalam struktur organisasi. Pegawai dengan posisi strategis diharapkan memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola unit kerja secara efektif. Di sisi lain, pegawai di tingkat teknis berperan sebagai pelaksana yang mendukung operasional harian dengan kompetensi yang sesuai bidangnya.

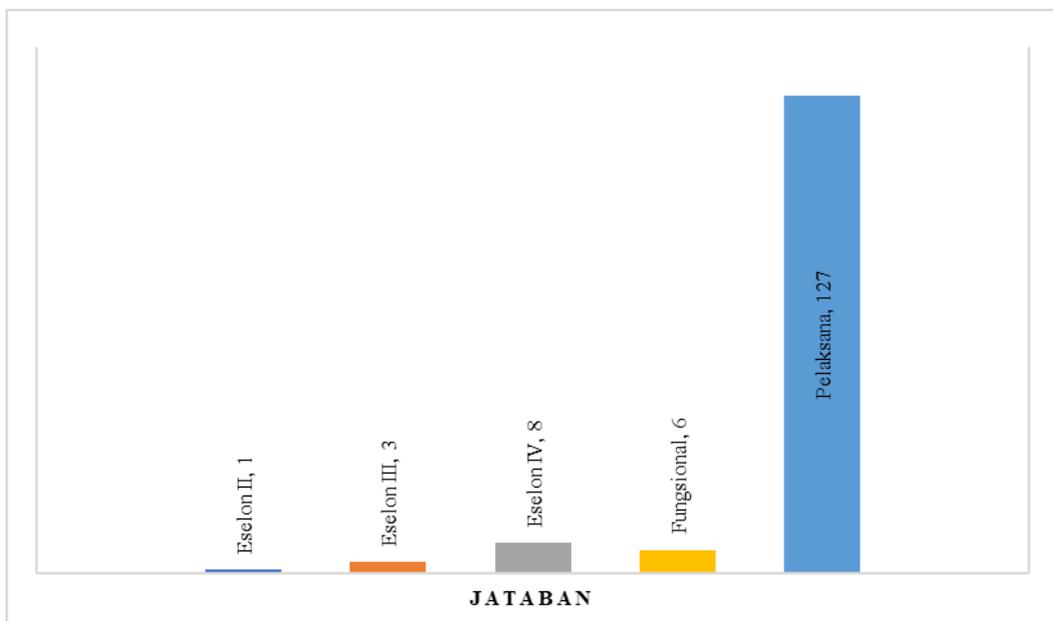
Jenis Diklat Penjenjangan yang telah diikuti juga menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pegawai dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, baik di bidang teknis maupun administratif, sehingga pegawai mampu memberikan kontribusi optimal. Data rinci mengenai pendidikan, jabatan, dan pelatihan pegawai per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut, memberikan gambaran komprehensif tentang profil sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Gambar 6.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Gambar 6.5 Data Pegawai berdasarkan Jabatan



Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.1 Data PNS berdasarkan Diklat Penjurangan

No	Jenis Penjurangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Adum/Diklat. Pim.IV	4	1. H. L. Herdan 2. Helmi Ariana 3. Suartini 4. Ahmad Humaidi
2.	Adumla	-	
3.	Spama/Diklat Pim.III	3	1. H. Lalu Herdan 2. Helmi Ariana 3. L. Zulfa Halim
4.	Spamen/Diklat Pim.II	-	
TOTAL		7	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Berdasarkan data pada tabel di atas, masih terdapat pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang belum mengikuti Diklat Penjurangan sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini. Hal ini menjadi perhatian penting untuk memastikan setiap pejabat memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Ke depan, diharapkan seluruh pejabat dapat mengikuti Diklat Penjurangan yang relevan, sehingga kapasitas dan pengetahuan mereka meningkat sesuai dengan kebutuhan jabatan. Peningkatan ini tidak hanya mendukung pengembangan individu, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan melalui APBD. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel terkait realisasi pendapatan, belanja, dan capaian kinerja sepanjang tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang memengaruhi capaian realisasi, khususnya pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki pengelolaan keuangan, khususnya di bidang perhubungan. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, langkah-langkah perbaikan akan terus diupayakan demi memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di masa mendatang.

Kami juga menyadari pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan kegiatan di bidang perhubungan. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas layanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Lombok Tengah



DRS. H. LALU HERDAN, M.Si.

NIP. 19690815 198903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

Dinas Perhubungan Kabupaten
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Lampiran 1. Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Gajah Mada No. 116 Praya – 83511; Email:
dishub@lomboktengahkab.go.id; Website: dishub.lomboktengahkab.go.id

NO	KODE REKENING		URAIAN	DEBET	KREDIT
1	2.1.06.02.02.0060	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	204.101,00	-
	2.1.06.02.02.0061	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.222.816.224,00	-
	2.1.06.02.02.0063	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.733.547,00	-
	8.1.02.02.01.0060	LO	Beban Tagihan Air	-	204.101,00
	8.1.02.02.01.0061	LO	Beban Tagihan Listrik	-	1.222.816.224,00
	8.1.02.02.01.0063	LO	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	1.733.547,00
			Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0060	LO	Beban Tagihan Air	212.939,00	
	8.1.02.02.01.0061	LO	Beban Tagihan Listrik	1.005.631.927,00	
	8.1.02.02.01.0063	LO	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.753.574,00	
	2.1.06.02.02.0060	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		212.939,00
	2.1.06.02.02.0061	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		1.005.631.927,00
	2.1.06.02.02.0063	NERACA	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1.753.574,00

NO	KODE REKENING		URAIAN	DEBET	KREDIT
			<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya</i>		
3	2.1.06.01.02.0001	NERACA	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	79.206.910,00	
	8.1.01.02.01.0001	LO	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		79.206.910,00
			<i>Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024</i>		
4	2.1.06.01.02.0001	NERACA	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17.706.500,00	
	8.1.01.02.01.0001	LO	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		17.706.500,00
			<i>Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024</i>		
4	8.1.01.02.01.0001	LO	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	88.940.740,00	
	8.1.01.02.01.0002		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52.750,00	
	2.1.06.01.02.0001	NERACA	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		88.940.740,00
	2.1.06.01.02.0002		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		52.750,00

NO	KODE REKENING		URAIAN	DEBET	KREDIT
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	2.1.06.01.01.0001	NERACA	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	6.878.300,00	
	2.1.06.01.01.0003	NERACA	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	345.961,00	
	2.1.06.01.01.0007	NERACA	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		
	2.1.06.01.01.0013	NERACA	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	2.1.06.01.01.0015	NERACA	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	624,00	
	8.1.01.01.01.0001	LO	Beban Gaji Pokok PNS		6.878.300,00
	8.1.01.01.02.0001	LO	Beban Tunjangan Keluarga PNS		345.961,00
	8.1.01.01.04.0001	LO	Beban Tunjangan Fungsional PNS		
	8.1.01.01.07.0001	LO	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	8.1.01.01.08.0001	LO	Beban Pembulatan Gaji PNS		624,00
			Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
6	8.1.01.01.01.0001	LO	Beban Gaji Pokok PNS		
	8.1.01.01.02.0001	LO	Beban Tunjangan Keluarga PNS		
	8.1.01.01.04.0001	LO	Beban Tunjangan Fungsional PNS		
	8.1.01.01.07.0001	LO	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	8.1.01.01.08.0001	LO	Beban Pembulatan Gaji PNS		
	2.1.06.01.01.0001	NERACA	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		
	2.1.06.01.01.0003	NERACA	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		
	2.1.06.01.01.0007	NERACA	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		

NO	KODE REKENING		URAIAN	DEBET	KREDIT
	2.1.06.01.01.0013	NERACA	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	2.1.06.01.01.0015	NERACA	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS		
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
7	1.1.12.01.01.0012	NERACA	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	142.334.232,00	
	1.1.12.01.03.0001	NERACA	Alat Tulis Kantor	289.406,00	
	1.1.12.01.03.0003	NERACA	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/Kuasi	100.000.000,00	
	8.1.02.01.01.0012	LO	Beban Bahan-Bahan Lainnya		142.334.232,00
	8.1.02.01.01.0024	LO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		289.406,00
	8.1.02.01.01.0026	LO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/Kuasi		100.000.000,00
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2024)		
8	8.1.02.01.01.0012	LO	Beban Bahan-Bahan Lainnya	180.600.000,00	
	8.1.02.01.01.0024	LO	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	430.100,00	
	1.1.12.01.01.0012	NERACA	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya		180.600.000,00
	1.1.12.01.03.0001	NERACA	Persediaan Alat Tulis Kantor		430.100,00
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada periode tahun lalu yang digunakan tahun berkenaan (Contohnya sisa persediaan th 2023 yg di pakai pada tahun 2024)		

NO	KODE REKENING	URAIAN		DEBET	KREDIT
9	8.1.08.01.02.0001	LO	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.102.025.036,02	
	1.3.07.01.02.0001	NERACA	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.102.025.036,02
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin		
10	8.1.08.01.02.0001	LO	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.108.598,00	
	1.3.07.01.02.0001	NERACA	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		87.108.598,00
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin		
11	8.1.08.01.02.0001	LO	Beban Penyusutan Jaringan dan Irigasi	1.094.551.939,00	
	1.3.07.01.02.0001	NERACA	Akumulasi Penyusutan Jaringan dan Irigasi		1.094.551.939,00
			Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin		
12	3.1.03.01.01.0001		RK PPKD	9300	
	1.1.01.02.01.0001		Kas di Bendahara Penerimaan		9300
JUMLAH				5.132.832.708,02	5.132.832.708,02

Praya, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



DRS. H. A. ALU HERDAN, M.Si.
NP. 196.0815.198903.1.007

Lampiran 2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan/ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006



Tanggal
DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP: 19690815 198903 1 007

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	251.980.000,00	251.980.000,00				
	Retribusi Daerah	251.980.000,00	251.980.000,00				
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.980.000,00	251.980.000,00				
II.	BELANJA DAERAH	19.516.614.026,66	19.516.614.026,66				
	BELANJA OPERASI	18.015.981.797,50	18.015.981.797,50				
	Belanja Pegawai	4.014.729.373,00	4.014.729.373,00				
	Belanja Barang dan Jasa	14.001.252.424,50	14.001.252.424,50				
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.015.981.797,50	18.015.981.797,50				
	BELANJA MODAL	1.500.632.229,16	1.500.632.229,16				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.142.718,12	1.268.142.718,12				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.489.511,04	232.489.511,04				

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00				
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.500.632.229,16	1.500.632.229,16				
	JUMLAH BELANJA	19.516.614.026,66	19.516.614.026,66				

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP: 19690815 198903 1 007

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN JANUARI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	3	5 =3-4	6	7	8 = 4+7
I	ASET	28.410.364.318,33	28.410.364.318,33				
1	ASET LANCAR	242.632.938,00	242.632.938,00				
	Kas dan Setara Kas	-	-				
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.300,00	9.300,00				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-				
	Persediaan	242.623.638,00	242.623.638,00				
	Barang Pakai Habis	242.623.638,00	242.623.638,00				
	JUMLAH ASET LANCAR	242.632.938,00	242.632.938,00				
2	ASET TETAP	25.048.103.762,31	25.048.103.762,31				
	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00				
	Tanah	1.752.550.000,00	1.752.550.000,00				
	Peralatan dan Mesin	14.387.741.291,07	14.387.741.291,07				
	Alat Angkutan	6.702.490.951,01	6.702.490.951,01				
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.658.865.404,00	1.658.865.404,00				
	Alat Pertanian	20.980.000,00	20.980.000,00				
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	424.866.800,02	424.866.800,02				
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68.400.000,00	68.400.000,00				
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.814.818,00	7.814.818,00				

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
	Alat Laboratorium	871.549.999,99	871.549.999,99				
	Alat Persenjataan	28.981.000,00	28.981.000,00				
	Komputer	443.270.500,00	443.270.500,00				
	Rambu-rambu	4.160.521.818,05	4.160.521.818,05				
	Gedung dan Bangunan	4.617.996.507,27	4.617.996.507,27				
	Bangunan Gedung	3.403.349.578,32	3.403.349.578,32				
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.214.646.928,95	1.214.646.928,95				
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.103.226.880,00	22.103.226.880,00				
	Jalan dan Jembatan	16.063.739.730,00	16.063.739.730,00				
	Bangunan Air	5.249.440.950,00	5.249.440.950,00				
	Instalasi	13.471.200,00	13.471.200,00				
	Jaringan	776.575.000,00	776.575.000,00				
	Akumulasi Penyusutan	(17.813.410.916,03)	(17.813.410.916,03)				
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.747.736.684,03)	(7.747.736.684,03)				
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(855.505.948,00)	(855.505.948,00)				
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.210.168.284,00)	(9.210.168.284,00)				
	JUMLAH ASET TETAP	25.048.103.762,31	25.048.103.762,31				
3	ASET LAINNYA	835.942.045,00	835.942.045,00				
	Aset Lain-lain	835.942.045,00	835.942.045,00				
	Aset Lain-lain	835.942.045,00	835.942.045,00				
	JUMLAH ASET LAINNYA	835.942.045,00	835.942.045,00				
	JUMLAH ASET	26.126.678.745,31	26.126.678.745,31				
II	KEWAJIBAN	1.096.591.930,00	1.096.591.930,00				
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.096.591.930,00	1.096.591.930,00				

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
	Utang Belanja	1.096.591.930,00	1.096.591.930,00				
	Utang Belanja Pegawai	88.993.490,00	88.993.490,00				
	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.007.598.440,00	1.007.598.440,00				
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.096.591.930,00	1.096.591.930,00				
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.096.591.930,00	1.096.591.930,00				
III	EKUITAS	25.030.086.815,31	25.030.086.815,31				
	EKUITAS	25.030.086.815,31	25.030.086.815,31				
	JUMLAH EKUITAS	25.030.086.815,31	25.030.086.815,31				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26.126.678.745,31	26.126.678.745,31				

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah



DR. S. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP: 19690815 198903 1 007

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	3	5 =3-4	6	7	8 = 4+7
I	PENDAPATAN	251.980.000,00	251.980.000,00				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	251.980.000,00	251.980.000,00				
	Retribusi Daerah-LO	251.980.000,00	251.980.000,00				
	Retribusi Jasa Umum-LO	251.980.000,00	251.980.000,00				
	Retribusi Jasa Usaha-LO	0	0				
	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0	0				
	Jasa Giro-LO	0	0				
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0	0				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	251.980.000,00	251.980.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN	251.980.000,00	251.980.000,00				
II	BEBAN	20.005.773.595,52	20.005.773.595,52				
	BEBAN OPERASI	17.722.088.022,50	17.722.088.022,50				
	Beban Pegawai	3.999.584.568,00	3.999.584.568,00				
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.678.912.774,00	2.678.912.774,00				
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.301.955.544,00	1.301.955.544,00				
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.716.250,00	18.716.250,00				
	Beban Barang dan Jasa	13.722.503.454,50	13.722.503.454,50				
	Beban Barang	1.457.879.609,50	1.457.879.609,50				

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
	Beban Jasa	11.922.893.154,00	11.922.893.154,00				
	Beban Pemeliharaan	247.695.500,00	247.695.500,00				
	Beban Perjalanan Dinas	94.035.191,00	94.035.191,00				
	JUMLAH BEBAN OPERASI	17.722.088.022,50	17.722.088.022,50				
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.685.573,02	2.283.685.573,02				
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.102.025.036,02	1.102.025.036,02				
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.108.598,00	87.108.598,00				
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.094.551.939,00	1.094.551.939,00				
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.685.573,02	2.283.685.573,02				
	JUMLAH BEBAN	20.005.773.595,52	20.005.773.595,52				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-19.753.793.595,52	-19.753.793.595,52				

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah



DR. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP: 19690815 198903 1 007

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	EKUITAS AWAL		25.519.246.384,17				
	SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(19.753.793.595,52)				
	RK PPKD		19.264.634.026,66				
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI NILAI PERSEDIAAN						
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP						
	LAIN-LAIN						
	EKUITAS AKHIR		25.030.086.815,31				

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006



Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

DRS. TI. LALU HERDAN, M.Si
NIP: 19690815 198903 1 007

Lampiran 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Habis Pakai



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gajah Mada No. 116 Telp. (0370) 654719 Praya 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Nomor : 027/914/XII/HUB/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Drs. H. Lalu Herdan, M.,Si.

Jabatan : Kepala Dinas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 30 Juni 2024 kepada :

Nama Lengkap : Baiq Risdawati

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	BARANG ATK				289.406,00
1	Kertas HVS F4	4	Rim	61.000,00	244.000,00
2	Amplop polos putih	1	Pcs	45.406,00	45.406,00
B	BARANG KUASI (Smard Card)				237.250.000,00
1	Belanja Bahan Lainnya	5490	bh	25.000	137.250.000,00
2	Belanja Cetak	4000	bh	25.000	100.000.000,00
C	MATERIAL PJU				5.084.232,00
1	Kabel NYM 2x2,5	3	Roll	1.694.744	5.084.232,00
TOTAL JUMLAH ATK+BARANG KUASI+MATERIAL PJU					242.623.638

Demikian Berita Acara Stock Opname ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Barang,

BAIQ RISDAWATI
NIP. 19801231 200801 2 035

Praya, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran,

Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1007

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/33/TT/2024/INS dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan
Penerimaan periode 2 Januari s/d 31 Desember 2024 Rp. 27.980.000
Pengeluaran periode sama Rp. 251.980.000
Saldo buku Rp. 0

Saldo kas Bendahara Penerimaan, terdiri dari :

Uang tunai di brankas Rp. -
Uang kertas (jika ada harus dirincikan) Rp. -
Uang logam (jika ada harus dirincikan) Rp. -
Uang di rekening Rp. -
Jumlah kas Rp. -
Selisih kas Rp. -

Penjelasan atas selisih kas :

Catatan :

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran


(Yuli Budiarti, S. JP)
NIP.197807282007012010



Tim Pemeriksa:

1. Suhoda (Wk. Penanggung Jawab)
2. Iwan Yulianto (Pengendali Teknis)
3. Roni Hamdani (Ketua Tim)
4. Bayu Prayitno (Anggota)

Beban Tunjangan Fungsional PNS	41.530.000												41.530.000
Beban Tunjangan Fungsional P3K	-												-
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.060.000												71.060.000
Beban Tunjangan Fungsional Umum P3K	2.520.000												2.520.000
Beban Tunjangan Beras PNS	122.317.380												122.317.380
Beban Tunjangan Beras P3K	1.013.880												1.013.880
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.004.763												3.004.763
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus P3K	-												-
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.591									624			27.967
Beban Pembulatan Gaji P3K	1.108												1.108
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.292.168.964	-	-	-	88.993.490	-	-	-	-	-		79.206.910	1.301.955.544
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.291.031.464				88.940.740							79.206.910	1.300.765.294
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.137.500				52.750								1.190.250
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.422.750	-	-	-	-	-							18.716.250

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.744.250											11.744.250
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum- Pelayanan Pasar	-											-
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	17.706.500									17.706.500		-
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.972.000											6.972.000
Beban Barang dan Jasa	14.001.252.425	-	181.030.100	-	1.007.598.440	-	242.623.638	-	-	-	-	13.722.503.455
Beban Barang	1.519.473.148	-	181.030.100	-	-	-	242.623.638	-	-	-	-	1.457.879.610
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.379.000											2.379.000
Beban Bahan-Bahan Kimia	-											-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	226.973.700											226.973.700
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.052.000		180.600.000				142.334.232					39.317.768

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000											3.050.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.100.000											7.100.000
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	49.647.000											49.647.000
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.998.000											11.998.000
Beban Perjalanan Dinas	94.035.191		-	-	-	-						94.035.191
Beban Perjalanan Dinas Biasa	85.245.191											85.245.191
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.790.000											8.790.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-		-	2.283.685.573	-	-						2.283.685.573
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-		-	1.102.025.036	-	-						1.102.025.036
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor				1.102.025.036								1.102.025.036
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-		-	87.108.598	-	-						87.108.598

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor				87.108.598								87.108.598
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-		-	1.094.551.939	-	-						1.094.551.939
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten				1.094.551.939								1.094.551.939
TOTAL BEBAN OPERASIONAL 2024			181.030.100	2.283.685.573	1.096.591.930	-						20.005.773.596

Praya, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1 007

Lampiran 6. STS Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2023 disetor 2024

 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. : 0006.a/DISHUB-ST5/2024
Bank : PT. BANK NTB SYARIAH
No. Rekening : 003.21.00705.00-0

Harap diterima uang sebesar : Rp. 9.300
(dengan huruf) Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	4.1.2.05.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9.300
JUMLAH			9.300

Uang tersebut diterima pada tanggal 29 Januari 2024

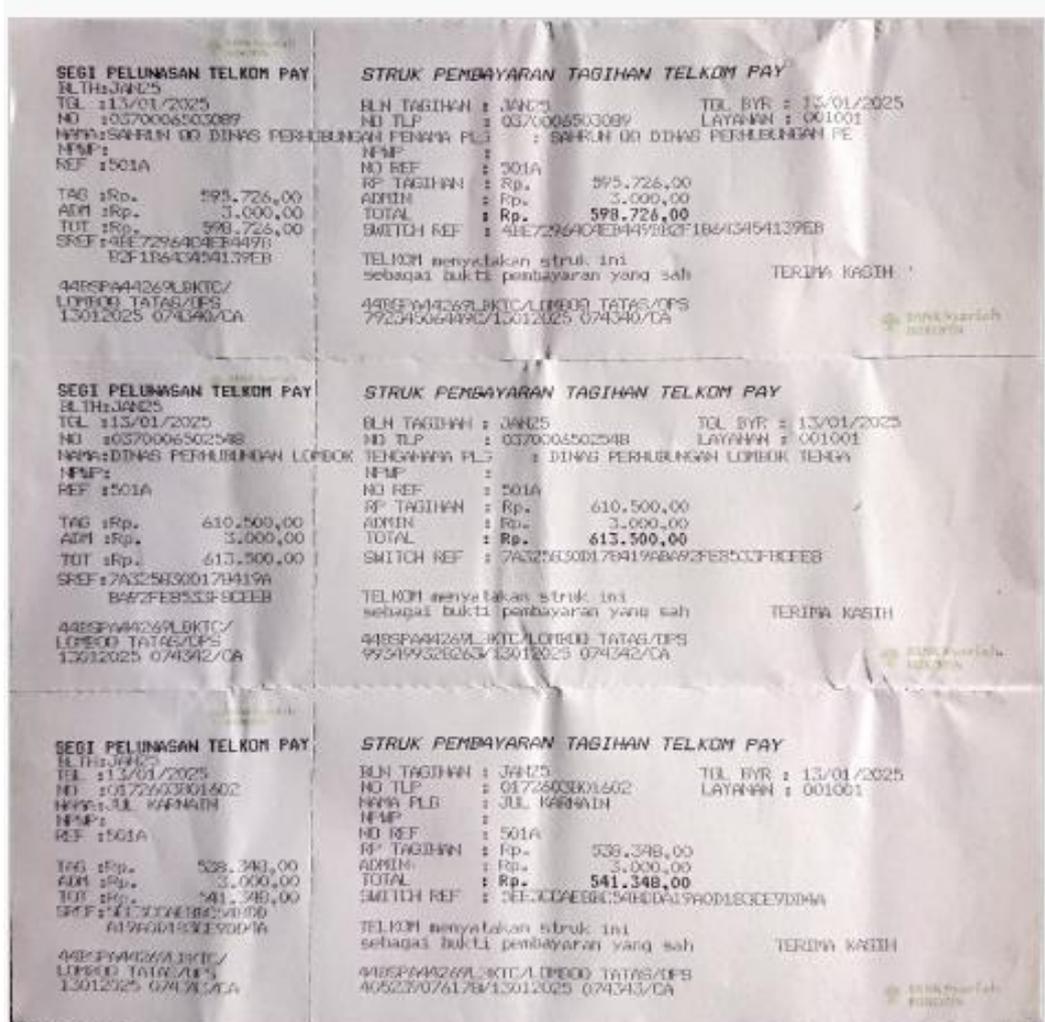
 **Mengabdi,
KEPALA DINAS**
UMS
PERNUBUNGAN
NIP.

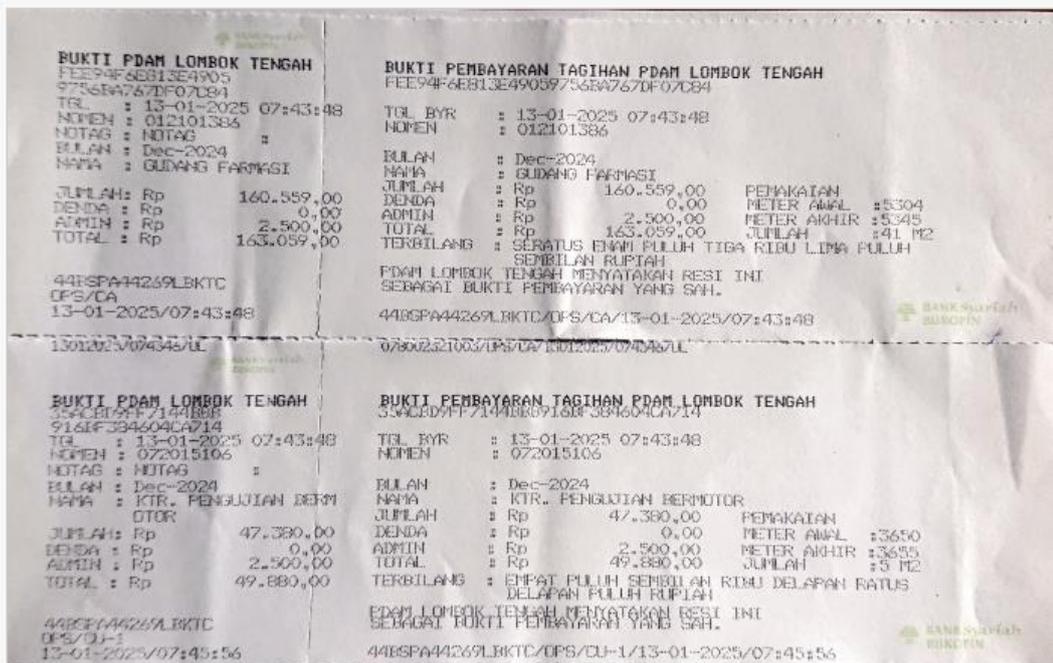
 **PT. BANK NTB SYARIAH
KCPRAYA**

BENDAHARA PENERIMAAN

YULI BUDIARTIH, SIP
NIP. 197807282007012010

Lampiran 7. Bukti Setor Tagihan Listrik, Internet dan Air Desember 2024 dibayar Januari 2025





Lampiran 8. Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap per 31 Desember 2024

NERACA KONSOLIDASI								
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH								
TAHUN 2024								
Kode Rekening	URAIAN		NERACA 2024	Penambah		Pengurang		NERACA 2023
					Belanja Modal	Penyusutan th berjalan	Penyusutan sd 2023	
	ASET							
1.3	ASET TETAP							
1.3.01		Tanah	1.752.550.000,00					1.752.550.000,00
1.3.02		Peralatan dan Mesin	6.640.004.607,04		1.268.142.718,12	1.102.025.036,02	6.645.711.648,01	13.119.598.572,95
1.3.03		Gedung dan Bangunan	3.762.490.559,27		232.489.511,04	87.108.598,00	768.397.350,00	4.385.506.996,23
1.3.04		Jalan, Irigasi, dan Jembatan	12.893.058.596,00			1.094.551.939,00	8.115.616.345,00	22.103.226.880,00

1.3.05		Aset Tetap Lainnya	-					
1.3.06		Konstruksi dalam Pengerjaan	-					
		JUMLAH ASET TETAP	25.048.103.762,31					41.360.882.449,18

Praya, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1 007

Lampiran 9. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Punguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Perhubungan - Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/33/TT/2024/INS Tanggal 27 Desember 2024 dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan		
Penerimaan periode 2 Januari s/d 30	Rp.19.523.317.653,66	
Desember 2024		
Pengeluaran periode sama	Rp.19.516.614.026,66	
Saldo bujar		Rp. 6.703.627

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

Uang tunai di brankas		Rp. -
Uang kertas 100.000 lbr Rp.	
Uang kertas 75.000 lbr Rp.	
Uang kertas 50.000 lbr Rp.	
Uang kertas 20.000 lbr Rp.	
Uang kertas 10.000 lbr Rp.	
Uang kertas 5.000 lbr Rp.	
Uang kertas 2.000 lbr Rp.	
Uang kertas 1.000 lbr Rp.	
Jumlah Uang Kertas	Rp.	
Uang logam 1000 keping Rp.	
Uang logam 500 keping Rp.	
Jumlah Uang Logam	Rp.	
Uang di rekening		Rp. -
Jumlah kas		Rp. -
Selisih kas		Rp.

Penjelasan atas selisih kas :

.....

.....

.....

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

(Mafira Gita Apriliani, SE)
NIP.199604042020122021



- Tim Pemeriksa:
1. Suhada (Wk.Penanggung jawab)
 2. Sahabudin (Pengendali Teknis)
 3. Rotti Hamdani (Ketua Tim)
 4. Bayu Prayitno (Anggota)